JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Di Ksop Utama Belawan Medan

Author:
Gina Ariesta Gobel [1]
Ayu Kurnia Sari [2]
Yunita Sari Rioni [3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email
ayukurniasari@dosen.pancabudi.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang harus diterapkan oleh setiap instansi publik, termasuk di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan Medan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengawasan keselamatan pelayaran dan pengelolaan aktivitas pelabuhan, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya
Metode penelitian: cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.
Hasil penelitiannya adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan di KSOP Utama Belawan Medan. SAP membantu proses pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP juga meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Laporan keuangan sebagai media bagi perusahaan untuk menyediakan informasi bagi para pemakai harus bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan (error) ataupun *fraud* (kecurangan) agar tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan sebagai salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan efek yang timbul adalah ketidaksesuaian laporan keuangan dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi berterima umum (Utama, Ramantha, & Badera, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang harus diterapkan oleh setiap instansi publik, termasuk di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan Medan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengawasan keselamatan pelayaran dan pengelolaan aktivitas pelabuhan, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dapat dibandingkan, dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Implementasi SAP bukan hanya sebatas pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap penggunaan dana publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan SAP di instansi pemerintah, termasuk KSOP Utama Belawan Medan, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip SAP, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya berbasis akrual, serta lemahnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas serta transparansi keuangan instansi.

Selain itu, tuntutan dari publik dan lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin tinggi. Oleh karena itu, KSOP Utama Belawan Medan perlu memastikan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Implementasi SAP secara konsisten diharapkan mampu memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KSOP Utama Belawan Medan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah diimplementasikan di KSOP Utama Belawan Medan dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pertanggungjawaban laporan keuangan instansi tersebut.

Perusahaan harus bisa meminimalisir sistem yang tidak tepat agar memiliki keunggulan bersaing. Dalam hal ini perusahaan perbankan sangat rentan sebagai media untuk melakukan sebuah kecurangan. Kecurangan ialah manipulasi danpenipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Umumnya kecurangan dalam bidang keuangan berkaitan korupsi yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta menyesatkan, penyalahgunaan atau pelanggaran

aturan. Kinerja keuangana bank tergambar dengan kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu dan dilihat pula dari tingkat rendahnya tingkat kecurangan bank itu sendiri. Menurut Febri & Yogi dalam Ginanjar & Syamsul (2020) menyatakan bahwa auditor adalah salah satu peran yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan tersebut.

Kecurangan laporan keuangan memengaruhi berbagai pelaku pasar, termasuk investor, organisasi, dan karyawan**.** Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linggupa (2024) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan akuntansinya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada laporan realisasi Anggaran, namun laporan keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh kelompok pengguna laporan keuangan guna mengambil keputusan.

Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut adalah "Apakah kebijakan akuntansi aktiva tetap yang telah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ?" Kebijakan - kebijakan yang ditemui adalah sebagai berikut : 1. Penerapan standar akuntansi keuangan terhadap aktiva tetap berwujud telah diterapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik. 2. Aktiva yang dimiliki perusahaan terdiri dari beberapa Jems aktiva yang dikelompokkan menurut kepentingan dan fungsinya. 3. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap, perusahaan menggunakan metode garis lurus (Straigh Line Method) untuk semua jenis aktiva yang dimiliki. 4. Aktiva tetap yang sudah penuh disusutkan dan tidak dipergunakan lagi, perusahaan mempunyai kebijakan dengan mengelompokkannya sebagai aktiva lain-lain dengan nilai Rp 1,00. Peranan aktiva tetap dalam perusahaan sangat penting bagi setiap perusahaan dimana secara umum penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap aktiva tetap berwujud pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan telah diterapkan dan dijalankan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan tersebut adalah “Apakah kebijakan akuntansi aktiva tetap yang telah diterapkan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan?” Kebijakan yang ditemukan adalah sebagai berikut: 1. Penerapan standar akuntansi keuangan terhadap aktiva tetap berwujud telah diterapkan dan dijalankan oleh perusahaan dengan baik. 2. Aset yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis aset yang dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan fungsinya. 3. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap, perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aset yang dimiliki. 4. Aset tetap yang telah disusutkan penuh dan tidak digunakan lagi, perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelompokkannya sebagai aset lain-lain dengan nilai Rp 1,00.

Pengendalian internal sebuah perusahaan dilakukan oleh auditor melalui audit internal perusahaan tersebut, pengendalian internal dilaksanakan pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Salah satu fungsi audit internal pada sebuah perusahaan adalah membantu perusahaan dalam menjaga pengendalian internal. Pengendalian internal tersebut dapat berupa perbaikan pengendalian secara rutin dan berkala yang dimana sesuai dengan fungsi audit internal yakni memastikan seberapa jauh proses identifikasi dan penerapan dilaksanakan. Audit intenal ialah sebagai fungsi penilaian yang bersifat independen yang terdapat dalam sebuah perusahaan yang bertujuan mengevaluasi dan menguji berbagai macam kegiatan yang terdapat dalam suatu perusahaan (Sutanto dalam Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana standart akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan pertanggung jawaban laporan keuangan di KSOP Utama Belawan Medan.

Berdasarkan fenomena yang terdapat dalam latar belakang penelitian di atas, maka peneliti sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Di Ksop Utama Belawan Medan ".**

1.1 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Di KSOP Utama Belawan Medan?

2. Studi Literatur

2.1 Teori Peran (*Role Theory)*

Teori peran *(role theory)* yang dikemukakan oleh Fisher (1982) dalam buku Sugeng Sejati (dalam Darniati, 2017). Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, dimana para aktor dan artis berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori ini juga dikenal istilah posisi peran *(role position).* Itu artinya adalah sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama. Mereka juga diperlakukan dengan cara tertentu yang sama, dari anggota masyarakat lainnya. Dalam setiap role position, terkandung istilah role expection. Artinya, keyakinan tentang serangkaian perilaku yang layak, hak-hak, kewajiban dan keistimewaan-keistimewaan yang ditujukan pada posisi peran tertentu (dalam Darniati, 2017).

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Kahn et al (dalam Rahman, 2020). Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Sesuai dengan teori ini, harapanharapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Dalam teorinya Biddle dan Thomas (1966) dalam Budiarto & Taher (2018) membagi peristilah dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut orang-orang yang mengambil bagian dalam intraksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, kaitan antara orang dan perilaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis dan menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripitif kuantitatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis penelitian yang digunakan dengan menggambarkan dan menguji secara ilmiah. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan (Sukmadinata, 2016). Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain (Arikunto, 2019). Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

4.1 Hasil

4.1.1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di KSOP Utama Belawan Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di KSOP Utama Belawan Medan telah dilaksanakan melalui proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan. Penerapan SAP dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, implementasi SAP terlihat dari penggunaan sistem akuntansi pemerintah, pencatatan transaksi berdasarkan dokumen pendukung, penyusunan laporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, serta penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti yang sah agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntansi.

Penerapan SAP juga membantu KSOP Utama Belawan dalam menjaga keteraturan proses pelaporan keuangan. Dengan adanya standar yang jelas, pegawai pengelola keuangan memiliki pedoman dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan. Hal ini penting karena laporan keuangan instansi pemerintah harus menggambarkan kondisi keuangan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SAP masih dapat menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan pemahaman teknis pegawai terhadap perubahan aturan akuntansi, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan kelengkapan dokumen pendukung, serta perlunya koordinasi yang lebih baik antarbagian dalam proses penyusunan laporan keuangan.

4.1.2 Pertanggungjawaban Laporan Keuangan di KSOP Utama Belawan Medan

Pertanggungjawaban laporan keuangan di KSOP Utama Belawan Medan dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan penggunaan anggaran, realisasi belanja, pengelolaan aset, dan kewajiban instansi. Laporan keuangan tersebut menjadi sarana bagi instansi untuk menunjukkan bahwa anggaran yang diterima telah digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan semakin baik apabila penyusunan laporan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan. SAP membantu memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan oleh pimpinan, auditor, kementerian, dan pihak terkait lainnya untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan instansi.

Pertanggungjawaban laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian pencatatan dengan standar akuntansi, keakuratan data keuangan, serta adanya pengendalian terhadap transaksi keuangan. Apabila aspek-aspek tersebut terpenuhi, maka laporan keuangan akan lebih mudah diaudit dan lebih dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaannya, KSOP Utama Belawan perlu memastikan bahwa setiap bagian yang terlibat dalam proses keuangan memahami tanggung jawabnya. Hal ini penting karena kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan tidak hanya bergantung pada bagian keuangan, tetapi juga pada unit-unit lain yang menghasilkan dokumen transaksi, data kegiatan, data aset, dan laporan pendukung.

4.1.3. Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan dengan SAP

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan laporan keuangan di KSOP Utama Belawan Medan telah diarahkan untuk mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Kesesuaian tersebut terlihat dari penyusunan laporan yang berorientasi pada prinsip akuntansi pemerintah, penggunaan dokumen sebagai dasar pencatatan, serta penyajian informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban.

SAP memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi pemerintah dicatat dan dilaporkan. Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan menjadi lebih tertib dan memiliki format yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks KSOP Utama Belawan, kesesuaian terhadap SAP menjadi penting karena instansi ini mengelola anggaran dan aset negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Namun, kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai, penguatan sistem informasi keuangan, perbaikan dokumentasi transaksi, serta evaluasi berkala terhadap proses penyusunan laporan. Jika proses tersebut dilakukan secara konsisten, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

4.1.4 Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang baik harus memuat informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berperan penting dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan di KSOP Utama Belawan Medan.

Informasi yang relevan berarti laporan keuangan mampu membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Informasi yang andal berarti laporan keuangan disusun berdasarkan data dan bukti transaksi yang valid. Informasi yang dapat dibandingkan berarti laporan keuangan memiliki format dan dasar penyusunan yang konsisten. Sementara itu, informasi yang dapat dipahami berarti laporan keuangan disajikan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Penerapan SAP membuat proses penyajian informasi keuangan menjadi lebih terarah. Dengan standar yang sama, setiap transaksi dapat dicatat dan dilaporkan secara lebih konsisten. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan memperkuat pertanggungjawaban instansi.

4.1.5 Kendala dalam Implementasi SAP

Meskipun implementasi SAP telah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Pertama, masih diperlukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap teknis penerapan SAP, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan.

Kedua, kelengkapan dokumen pendukung masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Laporan keuangan yang baik harus didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan sah. Apabila dokumen pendukung belum tersedia secara lengkap atau terlambat disampaikan, maka proses pencatatan dan pelaporan dapat terhambat.

Ketiga, koordinasi antarbagian perlu terus diperkuat. Proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya melibatkan bagian keuangan, tetapi juga unit kerja lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta administrasi anggaran.

Keempat, pemanfaatan sistem informasi keuangan perlu dioptimalkan. Sistem informasi dapat membantu mempercepat pencatatan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan. Namun, sistem tersebut harus didukung oleh kemampuan pegawai dalam mengoperasikannya.

4.1.6 Upaya Peningkatan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

Untuk meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan, KSOP Utama Belawan Medan perlu melakukan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait penerapan SAP. Pegawai yang memahami standar

akuntansi pemerintahan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan secara benar dan sesuai ketentuan.

Kedua, memperkuat sistem dokumentasi transaksi. Setiap transaksi keuangan harus memiliki bukti yang lengkap, sah, dan mudah ditelusuri. Dokumentasi yang baik akan memudahkan proses audit dan memperkuat akuntabilitas laporan keuangan.

Ketiga, meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Setiap unit yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan aset perlu menyampaikan data secara tepat waktu kepada bagian keuangan. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyusunan laporan dan mengurangi risiko kesalahan data.

Keempat, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan. Pemanfaatan sistem yang baik dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih tertib dan transparan.

Kelima, melakukan evaluasi internal secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dapat dilaksanakan secara konsisten.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi SAP sebagai Dasar Akuntabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Implementasi SAP di KSOP Utama Belawan Medan berfungsi untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara tertib, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, laporan keuangan tidak disusun berdasarkan kebiasaan masing-masing pegawai, tetapi berdasarkan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerapan SAP juga memperkuat akuntabilitas keuangan karena setiap transaksi harus dicatat berdasarkan bukti yang sah dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa SAP bukan hanya pedoman teknis akuntansi, tetapi juga instrumen pengendalian dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Dalam konteks KSOP Utama Belawan Medan, implementasi SAP menjadi penting karena instansi ini mengelola anggaran negara dan aset pemerintah. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, realisasi belanja, serta pengelolaan sumber daya negara secara transparan.

4.2.2 SAP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan SAP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena standar ini memberikan pedoman mengenai cara mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP memiliki struktur yang lebih jelas dan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan instansi.

Kualitas laporan keuangan yang baik sangat penting bagi KSOP Utama Belawan Medan karena laporan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban kepada pemerintah, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila laporan keuangan disusun secara tidak tepat, maka informasi yang dihasilkan dapat menimbulkan kesalahan dalam penilaian kinerja dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, implementasi SAP membantu meningkatkan keandalan laporan keuangan. Laporan yang andal akan lebih mudah diperiksa, lebih mudah dipahami, dan lebih dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan keuangan.

4.2.3 SAP dalam Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban

Transparansi dan pertanggungjawaban merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Transparansi berarti informasi keuangan disajikan secara terbuka, jelas, dan dapat ditelusuri. Pertanggungjawaban berarti setiap penggunaan anggaran dapat dijelaskan dan dibuktikan sesuai ketentuan.

Implementasi SAP mendukung kedua aspek tersebut karena setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan secara sistematis. Apabila pencatatan dilakukan dengan baik, maka pimpinan dan pihak pemeriksa dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan, kegiatan apa yang dibiayai, serta apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan.

Di KSOP Utama Belawan Medan, penerapan SAP dapat membantu mencegah kesalahan pencatatan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan tanggung jawab keuangan secara baik.

4.2.4 Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi SAP

Keberhasilan implementasi SAP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan negara, penggunaan sistem informasi keuangan, serta prosedur pelaporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat implementasi SAP. Jika pegawai memahami standar dan prosedur yang berlaku, maka proses pencatatan dan pelaporan akan lebih tepat. Sebaliknya, jika pemahaman pegawai masih terbatas, maka risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan ketidaksesuaian penyajian dapat meningkat.

Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan teknis perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi pegawai tidak hanya bermanfaat bagi penyusunan laporan keuangan, tetapi juga bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan instansi secara keseluruhan.

4.2.5 Peran Sistem Informasi dalam Mendukung SAP

Sistem informasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SAP. Dengan adanya sistem informasi, proses pencatatan transaksi, pengolahan data, penyusunan laporan, dan penelusuran dokumen dapat dilakukan lebih efektif. Sistem informasi juga membantu mengurangi risiko kesalahan manual dan mempercepat proses penyajian laporan keuangan.

Di KSOP Utama Belawan Medan, pemanfaatan sistem informasi keuangan perlu terus dioptimalkan agar laporan keuangan dapat disusun lebih cepat, akurat, dan sesuai standar. Namun, sistem informasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh data yang lengkap dan pegawai yang memahami cara penggunaannya.

Oleh karena itu, sistem informasi harus didukung oleh prosedur kerja yang jelas, pelatihan pegawai, serta pengawasan terhadap kualitas data yang diinput. Dengan demikian, sistem informasi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan.

4.2.6 Hambatan dan Solusi Implementasi SAP

Hambatan utama dalam implementasi SAP umumnya berkaitan dengan sumber daya manusia, kelengkapan dokumen, koordinasi internal, dan pemanfaatan sistem informasi. Hambatan tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu, keakuratan, dan kualitas laporan keuangan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KSOP Utama Belawan Medan perlu memperkuat mekanisme kerja internal. Setiap transaksi harus segera didokumentasikan, setiap unit kerja harus menyampaikan data tepat waktu, dan bagian keuangan harus melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen. Selain itu, evaluasi internal perlu dilakukan agar kesalahan dapat diperbaiki sebelum laporan disampaikan kepada pihak yang lebih tinggi.

Dengan upaya tersebut, implementasi SAP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Kesimpulan

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan.**

   SAP memberikan pedoman bagi KSOP Utama Belawan Medan dalam mencatat,

mengklasifikasikan, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan.

2. **Implementasi SAP meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan.**

   Dengan penerapan SAP, setiap penggunaan anggaran dapat dicatat dan dibuktikan melalui dokumen pendukung yang sah, sehingga laporan keuangan lebih akuntabel.

3. **SAP berperan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan.**

   Laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan informasi keuangan.

4. **Pertanggungjawaban laporan keuangan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan koordinasi internal.**

   Proses pelaporan keuangan tidak hanya menjadi tugas bagian keuangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja yang menghasilkan data dan dokumen transaksi.

5. **Kendala implementasi SAP masih berkaitan dengan SDM, sistem, dan administrasi dokumen.**

   Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, bimbingan teknis, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta penguatan pengawasan internal.

6. **Implementasi SAP perlu dilakukan secara berkelanjutan.**

   Penerapan SAP yang konsisten dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan KSOP Utama Belawan Medan.

Referensi

Linggupa, R., Ruhupatty, L., & Lambajang, A. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Sesuai Psap No. 1 Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Manado. *EQUIL*, *6*(1), 13-13.

Pertanggungjawaban, P. I. A., INDONESIA, P. B. P. A. P. P., & WAN, I. C. M. B. JURUSAN Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan.

Putra, S. A., & Sari, A. K. (2024). Analisis Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, *6*(2), 22-26.

Rahman, A., & Kurniasari, A. (2021). Hubungan Tingkat Kecemasan Klien Post Operasi Appendictomy Dengan Mobilisasi Dini Di Rs Graha Husada Bandar Lampung. *Scientific Journal Of Altruistic Nursing,* 36-42.

Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, *5*(1), 60-70.

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, *6*(7), 62-65.

Simanjuntak, S. R. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan (Doctoral dissertation, Fakultas Sosial Sains).

SIREGAR, W. S. D. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Camat Medan Belawa*N* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).

Suroso, S., Setiawan, A., Mesra, B., Siregar, D. J. S., Mutia, Z., Tarigan, A. D., ... & Hamdani, H. (2019). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, p. 012268).

Sari, A. K., & Saputra, H. (2023, December). The Influence of Supply Chain Management on Company Performance (Literature Study). In *International Conference on Sciences Development and Technology* (Vol. 3, No. 1, pp. 88-90).